



**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN II
TAHUN SIDANG 2019-2020**

SENIN, 13 JANUARI 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
2020**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN II
TAHUN SIDANG 2019-2020
SENIN, 13 JANUARI 2020

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,
Salam Sejahtera bagi kita semua,
Om Swasti Astu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.*

Yang Kami hormati:

- Para Wakil Ketua DPR;
- Para Anggota DPR;
- Hadirin yang berbahagia.

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat hadir kembali dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020.

Pada kesempatan ini Pimpinan DPR mengucapkan selamat Tahun Baru 2020 kepada kita semua. Semoga tahun ini dapat menjadi awal prestasi bagi DPR RI Periode 2019-2024 dalam melaksanakan tugas-tugas konstitusionalnya. Terkait dengan perayaan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, DPR bersyukur dan memberikan apresiasi terhadap Pemerintah, aparat keamanan, dan seluruh lapisan masyarakat yang telah mampu menjaga keamanan dan ketertiban sehingga semuanya dapat berjalan tertib dan lancar.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Mengawali pidato pembukaan masa persidangan ini, atas nama Pimpinan DPR dan segenap Anggota DPR, kami menyampaikan rasa prihatin dan duka yang mendalam atas terjadinya bencana banjir dan tanah longsor di beberapa daerah di Indonesia, khususnya di wilayah Jabodetabek.

DPR berharap pada masa tanggap darurat ini seluruh pihak terkait dapat bersinergi dalam mengatasi segala permasalahan yang dihadapi oleh korban bencana serta tidak saling melempar tanggung jawab dan saling menyalahkan. Ke depan, DPR meminta agar Pemerintah dan pemerintah daerah lebih memperhatikan pentingnya kesiapan menghadapi segala jenis bencana dan terus membangun kesadaran masyarakat secara kolektif dalam pengurangan risiko bencana. DPR menghimbau kepada Anggota DPR yang daerah pemilihannya terkena bencana untuk dapat turun langsung ke masyarakat dan mengawasi penanganan bencana di dapilnya masing-masing.

(Catatan: BURT atas nama DPR telah menyerahkan bantuan untuk korban bencana di daerah Kalibata, Jakarta Selatan.)

Sidang Dewan yang Terhormat,

Pada masa sidang ini, sesuai dengan Pasal 225 ayat (1) Peraturan DPR tentang Tata Tertib, Pimpinan DPR akan menyampaikan Pidato Pembukaan yang menguraikan rencana kegiatan DPR pada Masa Persidangan II dan menginformasikan perkembangan terkait pelaksanaan tugas DPR lainnya.

Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 ini, DPR akan segera menetapkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2020, sebagai acuan dalam penyusunan dan pembahasan RUU antara DPR dengan Pemerintah, baik RUU yang berasal dari DPR, Pemerintah, maupun DPD. Daftar tersebut juga dapat menjadi cerminan dari beragam permasalahan dalam masyarakat yang membutuhkan perbaikan.

Pascapenetapan Daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2020 tersebut, DPR mendorong Pemerintah untuk segera mengajukan draf NA dan RUU *omnibus law* mengenai RUU tentang Cipta Lapangan Kerja dan RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian, dengan tetap memperhatikan aspirasi dari masyarakat luas agar menghasilkan produk legislasi yang berkualitas.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, DPR mengapresiasi Pemerintah yang telah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada kementerian dan lembaga, serta para

gubernur tepat waktu, sebagai tindak-lanjut telah disahkannya UU APBN Tahun Anggaran 2020.

Guna mendorong pertumbuhan ekonomi sedini mungkin sebagai bentuk *countercyclical instrument* terhadap potensi pelemahan ekonomi global, DPR mengharapkan Pemerintah dan pemerintah daerah secepatnya merealisasikan belanja yang telah direncanakan, khususnya belanja modal, tanpa mengesampingkan peningkatan kualitas belanja.

DPR juga meminta kepada Pemerintah dan pemerintah daerah untuk memastikan dan mengawal terlaksananya berbagai prioritas pembangunan yang sudah ditetapkan, dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hal tersebut di atas harus ditopang penerimaan negara yang lebih baik pada tahun 2020, mengingat pada tahun 2019 kinerja pertumbuhan perpajakan yang mengalami penurunan dan defisit keseimbangan primer mencapai angka Rp101,31 triliun per November 2019 atau lima kali lipat dari nominal yang dipatok dalam APBN 2019.

Pelebaran Defisit keseimbangan primer tersebut seharusnya diiringi dengan kebijakan fiskal yang tepat sasaran guna

mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, hal tersebut belum sepenuhnya terwujud. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang masih stagnan di angka 5 persen. Oleh karena itu, Pemerintah harus melaksanakan kebijakan fiskal yang lebih baik lagi dalam menstimulus perekonomian 2020.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Pada tanggal 23 September 2020 kita akan kembali mengadakan Pilkada Serentak. Pilkada Serentak tahun 2020 ini akan diikuti oleh 270 daerah, dengan rincian 9 pemilihan gubernur, 224 pemilihan bupati, dan 37 pemilihan walikota. DPR menghimbau agar pihak penyelenggara Pilkada mempersiapkan pelaksanaan Pilkada dengan sebaik-baiknya, mengingat masih adanya permasalahan yang berulang seperti tidak akuratnya Data Pemilih Tetap (DPT), netralitas penyelenggara, dugaan adanya *money politic*, serta munculnya konflik horisontal dalam masyarakat.

DPR juga menghimbau para calon kepala daerah agar aktif membangun kehidupan demokrasi, menjaga stabilitas, dan mematuhi regulasi dalam pelaksanaan Pilkada. Terkait dengan regulasi, Pimpinan DPR mendukung rencana Komisi II DPR untuk melakukan revisi terhadap UU Pilkada agar pelaksanaan

Pilkada dapat berjalan optimal. Dengan persiapan yang maksimal kita berharap semoga Pilkada Serentak 2020 berhasil menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan kehendak rakyat.

Sidang Dewan yang Terhormat, hadirin yang saya muliakan, DPR mengucapkan selamat atas pelantikan Dewan Pengawas KPK untuk pertama kalinya pada tanggal 20 Desember 2020 yang lalu. Dewan Pengawas KPK yang berfungsi sebagai pihak yang mengontrol dan mengawasi kinerja KPK diharapkan dapat menyeimbangkan kinerja pemberantasan dan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah NKRI yang menjadi kewenangan KPK.

Pada saat yang bersamaan Presiden RI juga telah melantik Pimpinan dan Komisioner KPK Periode 2019-2023, DPR berharap agar Dewan Pengawas dan Komisioner KPK dapat bekerja sama dengan baik guna menuntaskan perlawanan terhadap tindak pidana korupsi.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR akan melakukan proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap:

- 10 (sepuluh) Calon Hakim Agung yang telah diusulkan oleh Komisi Yudisial, yakni 6 (enam) orang calon Hakim Agung dan 4 (empat) orang calon Hakim *Ad Hoc*;
- Calon Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) pengganti Tony Prasetyantono yang meninggal dunia; dan
- Calon Anggota Lembaga Sensor Film periode 2019-2023.

Selain itu, DPR juga akan memberi pertimbangan terhadap Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Negara-Negara Sahabat. Dalam rangka mengoptimalkan tugas-tugas pengawasan, DPR juga akan melanjutkan tugas Tim Pemantau dan Tim Pengawas, serta Panja yang dibentuk melalui alat kelengkapan dewan guna terus dapat mengawal dan mengoreksi kebijakan Pemerintah sesuai dengan keinginan rakyat.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Dalam rangka menjalankan fungsi diplomasi parlemen, pada masa sidang ini DPR berencana mengirim delegasi untuk

menghadiri sejumlah pertemuan dan sidang/konferensi organisasi parlemen regional maupun internasional, antara lain:

1. Sidang *Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF)* pada tanggal 11-17 Januari 2020 di Australia. Pada forum ini Indonesia akan mengusulkan draf resolusi pada *Women Agenda* dan menjadi *co-sponsor* untuk beberapa draf resolusi pada agenda lainnya.
2. The 15th Session of the PUIC Conference pada 27-31 Januari 2020 di Burkina Faso.

Melalui forum-forum semacam ini, DPR akan turut memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia di dunia internasional.

Menyikapi pelanggaran wilayah Indonesia di Perairan Natuna, dengan tetap mengedepankan diplomasi dan cara-cara damai, DPR mendorong Pemerintah untuk mengambil langkah-langkah tegas yang diperlukan demi menjaga kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Kita tidak perlu mentolerir berbagai tindakan yang tidak menghormati kedaulatan

Indonesia dan tidak sesuai dengan tatanan internasional yang telah disepakati bersama.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Akhirnya, dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, saya atas nama Pimpinan DPR mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa Masa Persidangan II DPR RI, Tahun Sidang 2019–2020, akan dimulai sejak hari ini, Senin 13 Januari 2020 sampai dengan berakhirnya masa sidang periode ini dan kepada seluruh Anggota DPR, kami menyampaikan “SELAMAT BERAKTIVITAS” dan BERGOTONG-ROYONG memperjuangkan aspirasi serta harapan rakyat dalam MEMBANGUN INDONESIA YANG LEBIH MAJU. MERDEKA!!

Terima kasih.

Wassalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh,

Om shanti shanti om.

KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PUAN MAHARANI

10